



Disdag Usulkan HET Gas Bersubsidi Naik

■ Pemkot Yogya Cegah Distributor Perbanyak Pasokan di Luar Daerah

YOGYA, TRIBUN - Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Yogyakarta mengusulkan Harga Eceran Tertinggi (HET) gas LPG 3 Kilogram naik pada tahun ini. Kebijakan ini semata-mata untuk mencegah distributor memasok lebih banyak stok ke area lain di luar daerah karena selisih HET yang cukup signifikan.

Kepala Bidang Ketersediaan, Pengawasan, dan Pengendalian Perdagangan Disdag Kota Yogyakarta, Sri Riswanti, menjelaskan, pihaknya tengah mengusulkan kepada Pemda DIY dan gubernur setempat untuk melakukan penyesuaian HET gas LPG 3 Kg yang saat ini di angka Rp15.500 di pangkalan. Kondisi itu disebutnya berbeda cukup jauh dibandingkan dengan harga di daerah lain semisal Jawa Barat yang mematok di angka Rp19.000 di tingkat pangkalan.

Riswanti mengklaim bahwa, upaya ini dilakukan semata-mata untuk mengamankan stok LPG subsidi di wilayah setempat. Disdag Kota Yogyakarta juga menyebutkan bahwa HET gas LPG 3 kg belum mengalami penyesuaian sejak 2015 lalu.

Langkah menaikkan HET untuk menjaga ketersediaan barang. Lantaran, secara psikologi distributor akan berpengaruh dan aman untuk wilayah setempat yang saat ini masih satu area distribusi dengan Jawa Tengah, Solo dan juga Klaten.



Ketakutan kami selaku pengawas misalkan muncul lagi soal penyulingan dari 3 kg ke 12 kg karena disparitas harganya terlalu jauh.

"Harapannya agar kuota di DIY Jateng yang satu area regional ini bisa aman. Kan yang ditakutkan nanti kalau daerah tetangga harganya lebih tinggi, dikhawatirkan justru lari ke sana semua stoknya setelah sampai ke pangkalan. Memang ketika HET disesuaikan, harapan kami nanti kuota di DIY khususnya Kota Jogja aman," katanya, Rabu (9/3).

Di sisi lain, pihaknya mengakui bahwa kenaikan harga LPG di tingkat pangkalan nantinya akan berdampak pada penyesuaian harga komoditas lainnya serta sejumlah barang konsumsi. Namun hal ini mau tidak mau harus ditempuh karena kenaikan harga juga dialami oleh LPG subsidi 12 kg yang saat ini berada di angka Rp195 ribu hingga Rp200 ribu di pasaran, dan demi mengantisipasi celah kecurangan berupa penyulingan dari gas 3 kg subsidi ke 12 kg di lapangan.

"Memang itu yang dikhawatirkan juga nanti, ketakutan kami selaku pengawas misalkan muncul lagi soal penyulingan dari 3 kg ke 12 kg karena disparitas harganya terlalu jauh," ungkapnya.

"Makanya upaya kami akan segera saja menyesuaikan harganya sebagai langkah awal. Dan lagi pula kami juga tidak ingin ada peralihan penggunaan dari non subsidi kemudian jadi beralih ke subsidi karena harganya cukup jauh," imbuh dia.

Ketua Dewan Pertimbangan Hiswana Migas DIY, Siswanto, mengatakan, fenomena kenaikan harga gas non subsidi memang disebabkan oleh faktor global. Yang mesti dipastikan adalah ketersediaan stok dan pemerintah selaku pengawas berperani aktif dalam proses monitoring agar peralihan penggunaan dari non subsidi ke gas subsidi bisa dicegah seminimal mungkin.

Harus diawasi

Di sisi lain, ia menyebut bahwa penggunaan gas subsidi juga mesti diawasi agar peruntukannya sesuai dengan yang diharuskan. Jangan sampai ada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan fenomena kenaikan gas subsidi tersebut dengan tindakan yang menyalahi aturan dan berpotensi merugikan masyarakat banyak.

"Untuk stok kami juga tidak bisa bicara banyak karena hanya perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal penyaluran. Lagi pula jatah dan kuota per wilayah secara nasional sudah ditetapkan dan sudah terencana perbulannya berapa," jelasnya.

"Dia juga memastikan stok gas bersubsidi juga aman. "Namun kami pastikan bahwa stok aman dan tersedia dalam jumlah cukup khususnya untuk DIY," pungkasnya. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Maret 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005